

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG  
PANJANG**

*Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG**

Lovely Fortuna, 2120113041, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 110  
halaman, 2023.

**ABSTRAK**

Tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan menggunakan melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, idealnya hukum yang dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana perjudian online adalah Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan terhadap Undang-Undang ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online oleh aparat Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? 2. Apa Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data di Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. Data sekunder hanya sebagai data pendukung, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh: Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ada dua upaya yang dapat dilakukan yaitu: Upaya preventif merupakan upaya yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, Dengan cara Aparat Kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan himbauan-himbauan bahwa perjudian online itu dilarang. Kolaborasi dengan pihak terkait. Upaya represif usaha untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyeragaman atau penangkapan, pemblokiran situs perjudian online penuntutan dan pengadilan, melakukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana, Factor penghambat dan Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa kelemahan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. 2.Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian melalui internet. 3.Beban kerja aparat kepolisian yang berlebihan mengakibatkan pengolahan berkas perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. 4.Pemahaman dan kemampuan penyidik dalam bidang teknologi informasi yang kurang memadai menjadi masalah karena keahlian sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. dan diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana perjudian online dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat

**Kata kunci : Penegakan hukum, tindak pidana, perjudian online.**

## **THE LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE GAMBLING CRIMES IN THE JURISDICTION OF PADANG PANJANG CITY POLICE DISTRICT**

Lovely Fortuna, 2120113041, Master's Program in Law, Andalas University, 110 pages, 2023.

### **ABSTRACT**

Criminal gambling is regulated under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 303 bis of the Indonesian Criminal Code, while the criminalization of gambling conducted through electronic media is governed by Article 27 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Ideally, the law utilized by law enforcement authorities to combat online gambling crimes should be the specific law, namely Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. However, the implementation of this law has not been effectively enforced in the jurisdiction of Padang Panjang City Police District. The research problem formulation is as follows: 1. How is the law enforcement effort against online gambling crimes conducted by the Police in the jurisdiction of Padang Panjang City Police District? 2. What are the inhibiting factors or obstacles faced by the Police in enforcing the law against online gambling crimes in the jurisdiction of Padang Panjang City Police District? This study adopts an empirical juridical approach and is descriptive in nature. The primary data for this research were obtained through interviews and data collection at the Padang Panjang City Police District, while secondary data served as supporting information gathered through document studies. The research findings are as follows: Law enforcement efforts against online gambling crimes in the jurisdiction of Padang Panjang City Police District involve two approaches: 1. Preventive efforts, which are crucial in combating online gambling crimes, involve the Police providing education and awareness campaigns that online gambling is prohibited. Collaboration with relevant parties is also pursued. 2. Repressive efforts include obtaining information from the public, conducting investigations and inquiries, apprehending offenders, blocking online gambling sites, prosecuting and taking cases to court, and providing guidance and rehabilitation for offenders. The inhibiting factors and obstacles faced by the Police in tackling online gambling crimes are as follows: 1. Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has several weaknesses. The criminal sanctions for online gambling crimes based on Article 45 of the aforementioned law are lower than the penalties prescribed in Article 303 of the Indonesian Criminal Code. 2. The difficulty of obtaining evidence in online gambling cases. 3. Excessive workload for the police, leading to a considerable amount of time required for case processing. 4. Insufficient understanding and competence of investigators in the field of information technology, which hampers the investigation, inquiry, and apprehension processes. Adequate expertise is crucial in supporting these processes. Efforts are expected to minimize online gambling crimes and create a safer and healthier environment for the community.

**Keywords:** Law enforcement, criminal offense, online gambling.